

BAB I

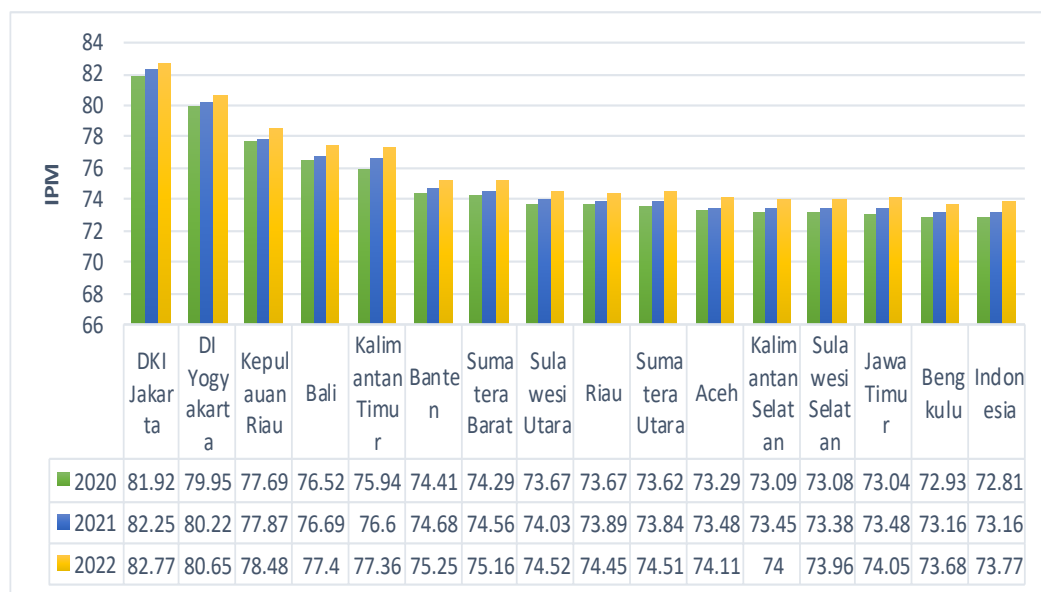
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan upaya yang penting untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Rahma *et al.*, 2022). Pada konteks ini, peran pemerintah daerah yaitu sebagai pengelola sumber daya dan sebagai penyedia layanan publik menjadi kunci untuk menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kesejahteraan yang lebih baik. Jawa Timur menjadi provinsi yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, mengingat posisinya sebagai salah satu provinsi yang berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto. Pembangunan yang berfokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari sisi ekonomi saja tetapi juga melalui kualitas penduduk. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas hidup manusia. IPM mencerminkan konsep pembangunan manusia diperkenalkan oleh *United Nations Development Programmer* (UNDP) tahun 1990, yang menempatkan pembangunan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan bukan hanya sebagai input dari pembangunan (Karyono *et al.*, 2021).

Indeks Pembangunan Manusia merupakan capaian dari hasil pengukuran pembangunan manusia yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Adapun tiga dimensi sebagai dasar perhitungan IPM, meliputi pendidikan, kesehatan dan standart

hidup layak (Mauludin & Dewi, 2020). Menurut Todaro (2003:28) dalam penelitian Wibawa & Arif (2022) menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia menjadi indikator kesejahteraan manusia yang menunjukkan kemajuan manusia berdasarkan faktor-faktor pendukungnya yang meliputi rata-rata harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf dan kesejahteraan secara keseluruhan. Angka IPM di Indonesia disajikan setiap tahun pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Capaian IPM dapat dikategorikan tinggi apabila menyentuh angka 70,00 hingga 80,00 dan diatas 80,00 termasuk kategori sangat tinggi (Karyono *et al.*, 2021).

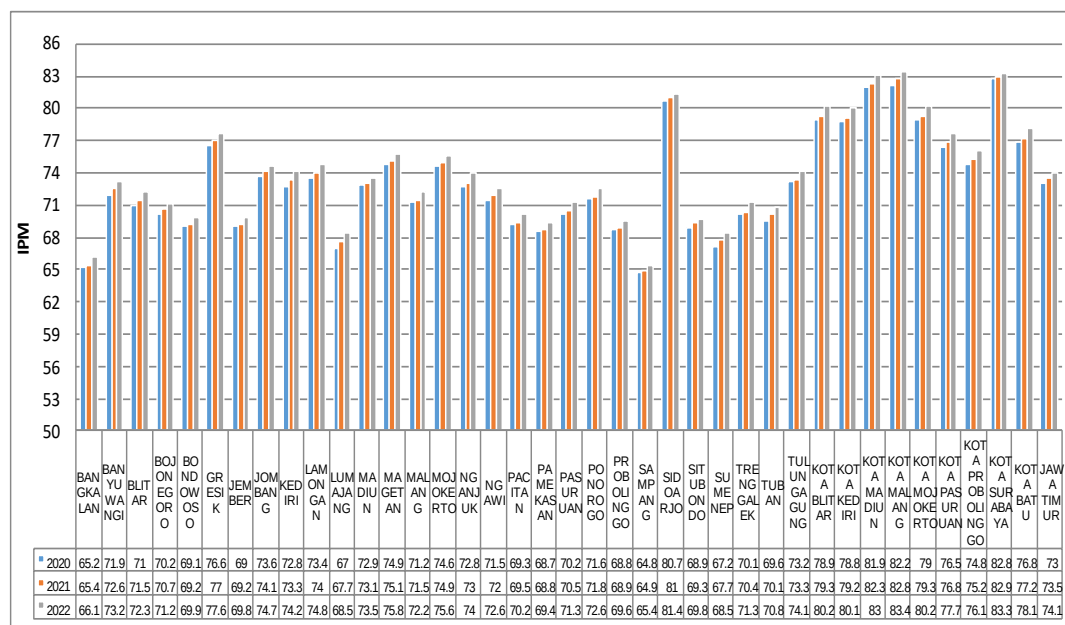


Gambar 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia 15 Provinsi Tertinggi di Indonesia Tahun 2020-2022

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 1.1 menunjukkan terdapat 15 provinsi di Indonesia yang memiliki IPM kategori tinggi dengan nilai diatas 70,00. Tahun 2020 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur berada pada urutan ke-14 dengan nilai sebesar 73,04 kemudian mengalami kenaikan menjadi urutan ke-12 di tahun 2022. Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia yang positif

dan stabil menunjukkan bahwa pembangunan manusia suatu daerah sudah berjalan dengan baik. Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur tahun 2022 mencapai angka 74,05. Angka tersebut menunjukkan IPM Jawa Timur berada pada kategori tinggi dan telah melebihi rata-rata nasional, akan tetapi dengan angka Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi bahkan sudah melebihi rata-rata. Provinsi Jawa Timur belum menduduki urutan 10 besar di Indonesia. Pada konteks pembangunan, manusia dianggap sebagai subjek sekaligus objek dan harus mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh sebab itu peran pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan (Zaufi *et al.*, 2016).



Gambar 1. 2 Indeks Pembangunan Manusia 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020-2022

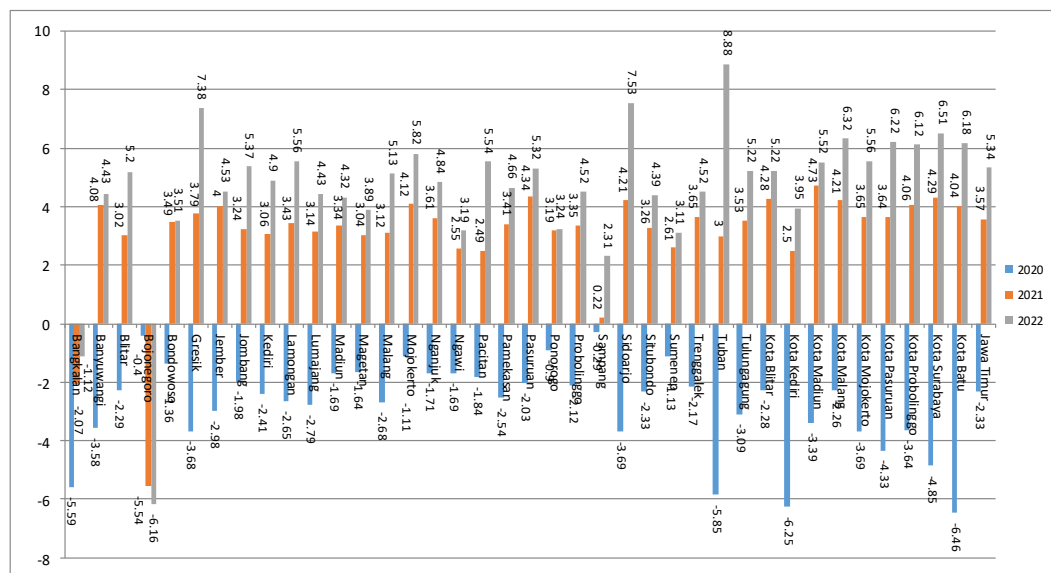
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, Indeks Pembangunan Manusia kategori tinggi di dominasi oleh 27 kabupaten/kota dengan nilai lebih dari 70,00. Sementara 4 kabupaten/kota

diantaranya memiliki angka Indeks Pembangunan Manusia di atas 80,00. Pada tahun 2022 Kota Malang menduduki urutan tertinggi dengan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 83,38 menggeser posisi Kota Surabaya yang sebelumnya berada pada urutan pertama, meskipun begitu Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya tetap meningkat dari tahun 2020 hingga 2022. Sementara itu, pada urutan ketiga tetap ditempati oleh Kota Madiun dengan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2022 sebesar 83,02. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia pada setiap daerah mengindikasikan bahwa segala akses pendidikan, kesehatan dan infrastruktur lainnya cukup memadai, adil dan merata sehingga dapat mendorong Indeks Pembangunan Manusia daerahnya. Indeks Pembangunan Manusia pada ketiga kota tersebut tergolong kriteria cukup tinggi. Bahkan beberapa diantaranya telah melampaui rata-rata Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur.

Salah satu kebijakan otonomi daerah adalah desentralisasi. Banyaknya kepulauan di Indonesia tidak tepat jika kewenangan pemerintahannya sentralisasi atau terpusat. Berdasarkan Teori Federalisme Fiskal yang dikemukakan oleh Oates pada tahun 1972, menyatakan bahwa terdapat hubungan antara keuangan dengan pemerintahan, artinya adanya pembagian kewenangan pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar dalam menjalankan urusan pemerintahannya sendiri, tujuannya untuk membangun daerah menjadi lebih baik demi tercapainya masyarakat yang sejahtera dengan kualitas hidup yang baik (Puspita & Hamidi, 2021). Teori tersebut menekankan bahwa dengan diterapkannya desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi akan tercapai. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi

dapat meningkatkan pendapatan sebagai syarat pemenuhan dasar dan perbaikan kualitas hidup manusia. Peningkatan pendapatan dianggap sebagai instrumen untuk memperbesar kapasitas pemerintah untuk menyediakan layanan fasilitas untuk meningkatkan pembangunan manusia. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia sebagai faktor input sekaligus tujuan utama dari proses pembangunan (Ezkirianto & Alexandi, 2018).



Gambar 1. 3 Pertumbuhan Ekonomi 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020-2022

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 1. 3 menunjukkan bahwa dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, sebagian besar kabupaten/kota yang memiliki nilai IPM tinggi diikuti kenaikan pertumbuhan ekonominya. Tahun 2020 perekonomian daerah Jawa Timur melemah karena pandemi covid-19, oleh karenanya menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun cukup signifikan. Presentase menunjukkan kabupaten dan kota berada pada angka negatif. Pertumbuhan yang negatif mengindikasikan adanya kontraksi ekonomi yang dapat

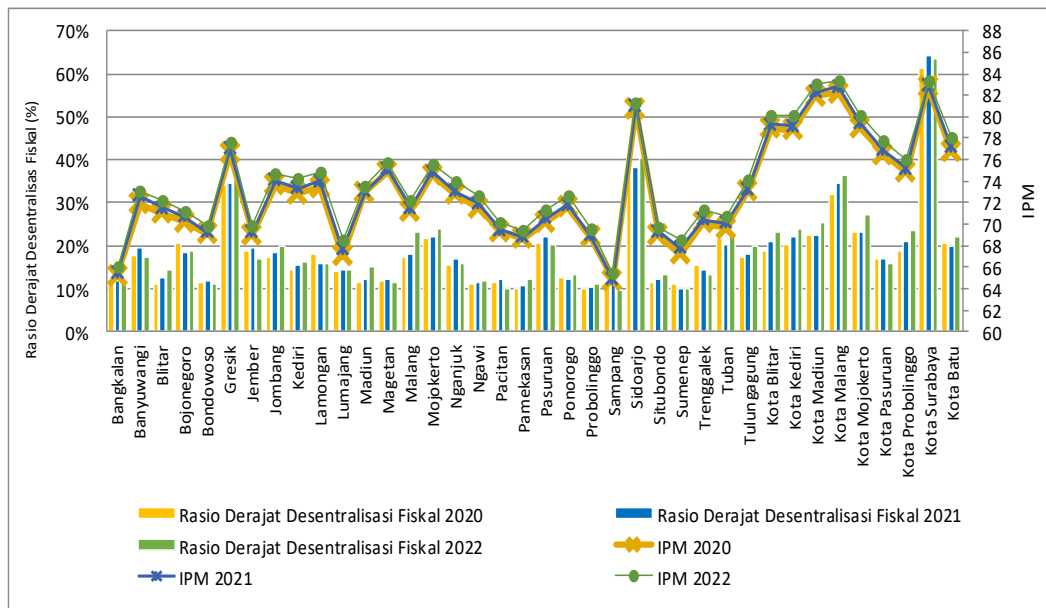
mengganggu kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dengan adanya pemulihan ekonomi, pemerintah daerah Jawa Timur di tahun 2021-2022 mampu meningkatkan pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi yang positif mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan. Ekonomi yang tumbuh akan diiringi dengan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat (Nur *et al.*, 2023).

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang positif tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia jika tidak diimbangi dengan pemerataan dalam akses layanan publik yang berkualitas. Peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonominya melalui belanja pemerintah yang dialokasikan untuk kegiatan belanja pendidikan, kesehatan dan lainnya sangat diperlukan (Khusaini, 2020). Akan tetapi, terdapat ketidakcocokan antara capaian pembangunan manusia dengan kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah merupakan suatu ukuran atau penilaian terhadap kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya keuangannya. Kinerja keuangan sendiri diukur melalui penghitungan rasio keuangan daerah. Pemerintah daerah bertanggungjawab dalam hal penganggaran untuk berbagai bentuk pelayanan publik, yang tentunya membutuhkan sumber pendanaan (Digdowiseiso & Satrio, 2022).

Sebelum reformasi pada tahun 1999, tuntutan diberlakukannya otonomi di semua pemerintah daerah di Indonesia. Dimulainya pelaksanaan otonomi daerah sebagai bentuk strategi untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menegaskan tata cara pemberian

kekuasaan, tanggung jawab dan wewenang kepada daerah otonom dalam mengatur urusannya sendiri terkait dengan urusan pemerintahan tujuannya untuk mendorong kemandirian daerah dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diberi mandat untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum dan daya saing daerah (Harliyani & Haryadi, 2016). Daerah otonomi memiliki keleluasaan dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik (Handayani *et al.*, 2023).

Diberlakukannya sistem otonomi daerah, pemerintah daerah berhak menghimpun dan mengelola sumber pendanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana lainnya (Wibawa & Arif, 2022). Diberlakukannya otonomi daerah juga tidak terlepas dari sistem desentralisasi. Desentralisasi yaitu pembagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab terkait penganggaran untuk pembangunan pelayanan publik, yang tentunya membutuhkan berbagai sumber dana (Digdowiseiso & Satrio, 2022). Teori Federalisme Fiskal menjelaskan hubungan keuangan dengan pemerintahan melalui pendekatan pengeluaran daerah, daerah dengan tingkat desentralisasi fiskal yang tinggi lebih mudah dalam mengelola sumber penerimaan daerah untuk aktivitas ekonomi dan lainnya (Puspita & Hamidi, 2021). Faktanya, diterapkannya desentralisasi pemerintah daerah belum mampu melaksanakan desentralisasi dengan semestinya tetapi pertumbuhan ekonomi meningkat diiringi dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.



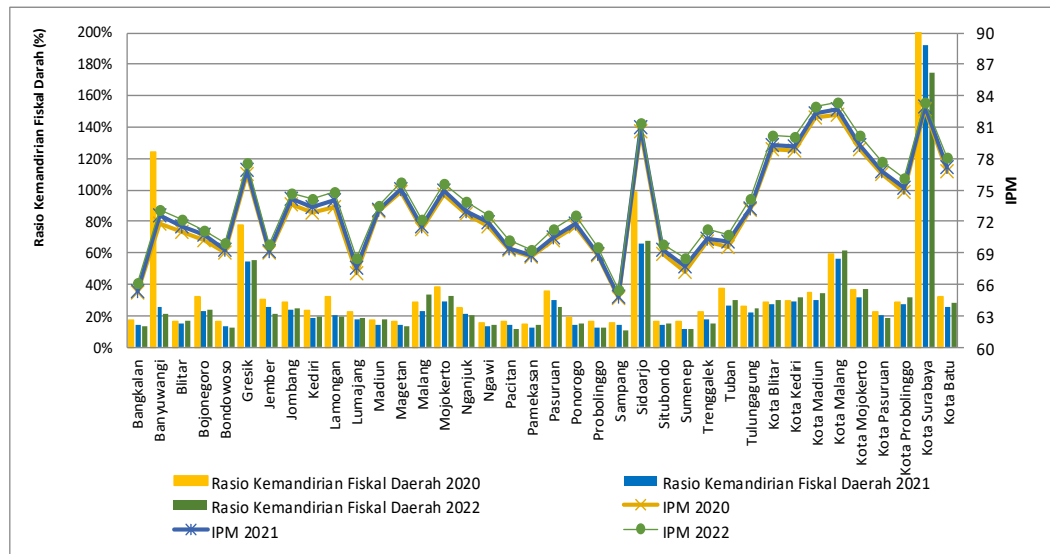
Gambar 1. 4 Data Gap Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dengan Indeks Pembangunan Manusia 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020-2022

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024 dan DJPK Kemenkeu yang diolah

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur sebanyak 34 kabupaten/kota terjadi ketidakcocokan antara rasio derajat desentralisasi fiskal dengan Indeks Pembangunan Manusia, yang dimana peningkatan Indeks Pembangunan Manusia tidak berbanding lurus dengan kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio derajat desentralisasi fiskal. Rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah maka kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi juga meningkat (Wibawa & Arif, 2022). Data menunjukkan pada setiap kabupaten/kota tersebut memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi akan tetapi presentase rasio derajat desentralisasi fiskal masih dibawah presentase 30%, yang artinya kemampuan daerah dalam penyelenggaraan

desentralisasi masih kurang bahkan dikategorikan rendah. Akan tetapi Indeks Pembangunannya meningkat dan sudah tergolong tinggi. Hanya 4 kabupaten/kota dengan presentase rasio derajat desentralisasi fiskal diatas 30% dan diikuti dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yaitu Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang, Kota Surabaya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan daerah tersebut dalam penyelenggaraan desentralisasi sudah cukup baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah tersebut sudah lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Desentralisasi fiskal melalui kinerja keuangan pemerintah didasarkan pada pertimbangan bahwa pemerintah daerah akan lebih mengetahui segala kebutuhan dan standart pelayanan bagi masyarakat (Rahma *et al.*, 2022). Dalam menjalankan urusan pemerintahan, pemerintah daerah akan bertopang pada Pendapatan Asli Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Nuwun *et al.*, (2019) menyatakan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten/kota di Indonesia. Adanya desentralisasi fiskal dapat memperkuat kemampuan keuangan daerah yang digunakan untuk berbagai program pembangunan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zaufi *et al.*, (2016) menjelaskan rasio derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini berarti bahwa dengan adanya desentralisasi fiskal yang kuat belum tentu akan dialokasikan pada program peningkatan Indeks Pembangunan Manusia melalui pertumbuhan ekonomi.



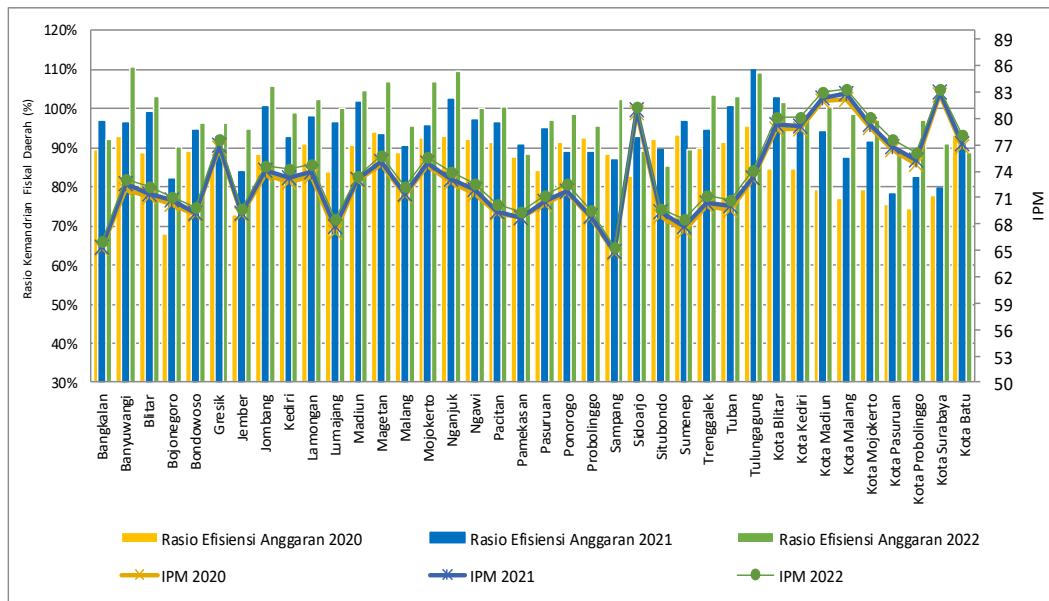
Gambar 1. 5 Data Gap Rasio Kemandirian Fiskal Daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020-2022

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024 dan DJPK Kemenkeu yang diolah

Gambar 1.5 menunjukkan bahwa dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur sebanyak 34 kabupaten/kota terjadi ketidakcocokan antara rasio kemandirian fiskal daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia, yang dimana peningkatan Indeks Pembangunan Manusia tidak berbanding lurus dengan kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio kemandirian fiskal daerah. Rasio kemandirian fiskal daerah merupakan ukuran kinerja keuangan daerah yang menunjukkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. Semakin tinggi nilai rasio kemandirian fiskal daerah maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri dan semakin rendah tingkat ketergantungan pada pendapatan transfer, begitupun sebaliknya (Wibawa & Arif, 2022). Data diatas menunjukkan bahwa kabupaten/kota tersebut rata-rata tingkat kemandiriannya masih tergolong rendah atau instruktif, artinya peran pemerintah lebih mendominasi. Hal ini dikarenakan suatu daerah belum mampu menjalankan otonomi daerah secara mandiri.

Akan tetapi Indeks Pembangunannya meningkat dan sudah tergolong tinggi. Hanya 4 kabupaten/kota yang memiliki presentase rasio kemandirian fiskal daerah diatas 50% yaitu Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang, Kota Surabaya artinya peran pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan dianggap mampu menjalankan otonomi daerah secara mandiri serta diikuti dengan peningkatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahma *et al.*, (2022) menyatakan bahwa rasio kemandirian fiskal daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Kemandirian daerah yang berpengaruh positif menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal sudah berjalan sebagaimana mestinya, artinya apabila tingkat kemandirian tinggi maka Indeks Pembangunan Manusia juga meningkat. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermawan *et al.*, (2024), menyatakan bahwa rasio kemandirian fiskal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM. Meskipun daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah tinggi belum tentu meningkatkan IPM. Ketika tingkat kemandirian tinggi maka Indeks Pembangunan Manusia akan turun. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah harus mampu mengubah proporsi belanja yang dialokasikan untuk melaksanakan program pembangunan (Bailusy, 2019). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi dasar penghitungan rasio efisiensi anggaran. Rasio efisiensi anggaran digunakan untuk menilai seberapa baik pemerintah daerah ketika menggunakan anggaran untuk mencapai tujuan dari pembangunan daerah.



Gambar 1. 6 Data Gap Rasio Efisiensi Anggaran dengan Indeks Pembangunan Manusia 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020-2022

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024 dan DJPK Kemenkeu yang diolah

Gambar 1.6 menunjukkan bahwa dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur sebanyak 34 kabupaten/kota terjadi ketidakcocokan antara rasio efisiensi anggaran dengan Indeks Pembangunan Manusia, yang dimana peningkatan Indeks Pembangunan Manusia tidak berbanding lurus dengan kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio efisiensi anggaran. Rasio efisiensi anggaran merupakan ukuran kinerja keuangan daerah menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah dapat menghasilkan berbagai output yang maksimal akan tetapi dengan input atau anggaran yang terbatas. Ketika sumber daya yang dimiliki yaitu anggaran dapat dimaksimalkan dalam kegiatan pembangunan yang berkualitas tentunya akan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data diatas menunjukkan bahwa rasio efisiensi anggaran pada kabupaten/kota tersebut melampaui presentase 90% keatas, yang artinya kinerja keuangan daerah masih

tergolong kurang efisien. Akan tetapi angka IPM meningkat dan tergolong tinggi. Hanya 3 kabupaten/kota yang tergolong cukup efisien pada tahun 2022 yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pamekasan, Kota Pasuruan dan Kota Batu dengan rasio efisiensi anggaran sebesar 89% dan diikuti peningkatan IPM. Semakin kecil rasio efisiensi anggaran maka semakin efisien. Sedangkan semakin besar presentase rasio efisiensi anggaran maka suatu daerah tingkat rasionya tergolong tidak efisien (Susanto, 2019).

Pemerintah daerah bisa lebih banyak mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia. Faktanya dalam lingkup Provinsi Jawa Timur, kabupaten/kota yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia tinggi masih menghadapi kendala dalam kinerja keuangan. Hanya 10,5% dari total kabupaten/kota yang menunjukkan kinerja keuangan yang optimal, yang dimana peningkatan pertumbuhan ekonomi dan IPM pada daerah tersebut sejalan dengan pengelolaan anggaran yang efisien dan mandiri. Sementara 89,5% lainnya, meskipun mencatat kenaikan nilai IPM, masih mengalami kendala dalam mengelola anggaran yang kurang efisien dengan tingkat kemandirian rendah. Berdasarkan fenomena permasalahan tersebut menjadi alasan apakah kinerja keuangan daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. Oleh sebab itu peneliti mengambil judul "Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020-2022".

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh rasio derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2020- 2022?
2. Bagaimana pengaruh rasio kemandirian fiskal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2020-2022?
3. Bagaimana pengaruh rasio efisiensi anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2020-2022?
4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2020-2022?
5. Bagaimana pengaruh rasio derajat desentralisasi fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2020-2022?
6. Bagaimana pengaruh rasio kemandirian fiskal daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2020-2022?
7. Bagaimana pengaruh rasio efisiensi anggaran terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2020-2022?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pada

kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2020-2022

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio kemandirian fiskal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2020-2022
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio efisiensi anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2020- 2022
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2020-2022
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio derajat desentralisasi fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2020-2022
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio kemandirian fiskal daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2020-2022
7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio efisiensi anggaran terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2020-2022

1.4 Manfaat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, ilmu pengetahuan dan informasi terkait dengan pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang fokusnya pada rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian daerah dan rasio efisiensi. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan rujukan bagi peneliti yang ingin meneliti kajian serupa.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan dapat membantu pemerintah daerah kabupaten dan kota dalam mengoptimalkan kinerja keuangan daerah khususnya dalam meningkatkan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian daerah dan rasio efisiensi, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.